

Media Workshop Triwulan IV Tahun 2019

Sejalan dengan visi BPK RI untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi dan permintaan saran dan harapan dari kalangan media, maupun pemberian pemahaman yang lebih mendalam, salah satu kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah Media Workshop

Media Workshop bertema "Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah" kembali dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara dimulai pada pukul 12.00 WIB ditandai dengan sambutan dari Kepala Perwakilan, dilanjutkan dengan pemaparan materi; Hasil Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2019, Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Semester II Tahun 2019, Hasil Pemantauan Kerugian Daerah Semester II Tahun 2019, dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per 6 Desember 2019.

Kepala Perwakilan, V. M. Ambar Wahyuni sebagai Pembicara/Narasumber didampingi Kepala Sub Bagian Humas dan TU, Ludfi Noviandi yang sekaligus bertindak sebagai moderator, Kepala Subauditorat Sumatera Utara I, Andanu, Kepala Subauditorat Sumatera Utara II, Puspitaningtyas, dan Kepala Subauditorat Sumatera Utara III, Nyra Yuliantina.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari media-media yang bertugas di wilayah Provinsi Sumatera Utara baik cetak, elektronik maupun media online, serta staf Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Diharapkan melalui kegiatan media workshop ini nantinya dapat tercipta hubungan kesepahaman dan kerjasama yang saling mendukung antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan media di Provinsi Sumatera Utara dalam menyebarkan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah secara jelas dan akurat kepada publik serta menjadi alat komunikasi kepada media dan masyarakat, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sampai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah.



Media Visit ke Harian Tribun



Dalam rangka memberikan pemahaman yang baik dan mendalam terhadap tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan BPK, maka diselenggarakan suatu kegiatan pemberian informasi terkait hal tersebut. Sebagai salah satu bentuk pemberian informasi tersebut adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Media Visit yang dilaksanakan dengan kunjungan ke media massa. Kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pendapat dalam penulisan dan penyiaran berita. Terutama pada berita yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BPK, yang pada gilirannya dapat menimbulkan persepsi yang salah dan tidak baik dari masyarakat yang membaca dan mendengarkan berita tersebut dari media massa.

Kegiatan Media Visit dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2019 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Redaksi Harian Tribun Medan. Acara dimulai pada pukul 10.00 WIB ditandai dengan sambutan dari Pemimpin Redaksi (Pemred), Syarif Dayan. Syarif Dayan menyambut baik kunjungan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dari pihak Harian Tribun Medan, media visit ini diikuti oleh Pemimpin Usaha, Setiawan, Manajer Iklan, Zulkarnain Rito, Editor, Truly Okto Purba, IT Support, Ismail, dan Reporter, Alija Magribi serta Septima Simanjorang.

Selanjutnya Pemred mempersilahkan kepada Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Ambar Wahyuni menjelaskan dalam sambutannya bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari BPK untuk membina Media Relations yang baik, karena media massa saat ini bukan hanya sebagai sarana dalam menyampaikan informasi tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan membangun sebuah pemahaman publik mengenai peran dan fungsi BPK dalam mendukung terciptanya pemerintah yang bersih dan akuntabel. Media elektronik dan media cetak sebagai partner dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, bagaimana tugas dan fungsi BPK sebagai Lembaga Negara dalam tugasnya sebagai pemeriksa keuangan Negara eksternal.

Disela pembicaraan, Pemred Harian Tribun Medan menyampaikan paparan terkait dengan perkembangan media saat ini yang sudah beralih perlahan tapi pasti menuju digital. Tribun Medan adalah salah satu perusahaan yang terus berinovasi di era digital. Sehingga sebagai perusahaan yang bergerak profesional, Tribun Medan menjalankan roda perusahaan sesuai kaidah bisnis dan jurnalistik, ujar pria yang akrab disapa Dayan.

Diakui Dayan, sejumlah perusahaan media masih belum menjunjung tinggi integritas jurnalistik, sehingga praktik-praktik yang mencurangi nilai jurnalistik terjadi. BPK dan instansi pemerintahan lainnya, kami anjurkan untuk melihat capaian perusahaan media tersebut sebelum memulai kerjasama periklanan, bagaimana visitor (pengunjung) per hari, jumlah berita dan produksi cetak, dan bagaimana membangun bisnis perusahaan media itu sendiri.

Diharapkan melalui kegiatan ini nantinya dapat tercipta hubungan kesepahaman dan kerjasama yang saling mendukung antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan Harian Tribun Medan dalam menyebarkan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah secara jelas dan akurat kepada publik.



Horas Medan

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Edisi Triwulan IV 2019

Penyerahan LHP Kinerja, PDTT, Pemantauan Keruda Semester II Tahun 2019, IHPS Dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam 4 tahun terakhir, TA 2015 s.d. 2019 menunjukkan semakin baik. BPK mengapresiasi atas upaya perbaikan jajaran pemda dan mengharapkan terus dapat meningkat semakin baik.

Perbaikan pengelolaan keuangan daerah tersebut tercermin pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak lanjut pemda atas rekomendasi BPK dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan daerah, meningkat. pada awal tahun 2016 rata-rata hanya 57,21%, meningkat pada akhir tahun 2019 menjadi 80,93%;
2. Penyerahan LKPD unaudited kepada BPK yang tepat waktu s.d. 31 Maret, meningkat. Penyerahan LKPD kepada BPK yang tepat waktu pada TA 2015 hanya 5 pemda meningkat pada TA 2018 menjadi 28 pemda;
3. Capaian LKPD yang memperoleh opini terbaik, WTP, meningkat. Pemda yang memperoleh opini WTP pada TA 2015 sebanyak 6 pemda, meningkat pada TA 2018 menjadi 17 pemda.

Selain itu, BPK pada semester II tahun 2019 telah meminta komitmen tertulis kepada 17 kepala daerah yang belum memperoleh opini WTP untuk menindaklanjuti langkah-langkah teknis sehingga opini dapat lebih baik, dan menyampaikan matrik kepada BPK untuk dimonitor dan dievaluasi progresnya.

BPK sangat mengharapkan kepala daerah yang belum memperoleh opini WTP pada LKPD TA 2018, dapat menindaklanjuti dan segera menyelesaikan permasalahan yang mempengaruhi opini.

Tambahan penjelasan oleh Kepala Perwakilan, berdasarkan Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK



menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemeriksaan LPJ tentang bantuan keuangan Parpol. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap LPJ yang telah diterima oleh BPK paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itu, kami mengingatkan bahwa Partai Politik wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban TA 2019 kepada BPK paling lambat tanggal 31 Januari 2020. Apabila partai politik menyerahkan laporan pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Januari 2020, maka BPK tidak melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban tersebut.

Sebagai penutup, Kepala Perwakilan menyampaikan terimakasih kepada DPRD atas perhatian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Semoga hasil-hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan serta sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dan jajaran dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk lebih baik dalam pengelolaan keuangan.

Dewan Redaksi

Pengarah	: Ambar Wahyuni
Penanggungjawab	: Sigit Hermawan
Ketua	: Ludfi Noviandi
Pelaksana:	
Venny, M. Amin, Ahmad Nur, Heryando	
Pasaribu, Tetap Purba, Ratna Tri Darmayanti, Jumakhir, M. Zamroni, Zulfikri, Rizqi Anggraeni, Dar Agnema, M. Ali Azril, Rifla Anwar.	

Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Per 24 September 2019

Dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK per 24 September 2019 atas 34 Pemerintah Daerah (Pemda) dan 2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Laporan Hasil Pemantauan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Subauditorat Sumatera Utara I, Andanu, kepada Kepala daerah atau yang Mewakili. Pada kesempatan tersebut, BPK mengungkapkan progres penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Triwulan III Tahun 2019 Mencapai 79,61%. Untuk itu BPK menyampaikan penghargaan atas usaha dari Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sumatera Utara. BPK memahami bahwa upaya tersebut tentu tidak lepas dari keaktifan Inspektorat dari masing-masing Pemda dan bagian pengawasan dari masing-masing BUMD, untuk terus

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara



Kepala perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara Menghadiri Undangan atas Kunjungan Kerja (kunker) Komisi XI DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019/2020 di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pertemuan yang dilaksanakan di auditorium Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini, dilaksanakan mulai pukul 14.00wib. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil kinerja dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2019 diantaranya: Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah mengalami peningkatan mulai dari ketepatan waktu pada saat menyerahkan LKPD kepada BPK, hingga peningkatan jumlah Pemda yang memperoleh opini WTP dari Tahun 2016 sebanyak 6 Pemda menjadi 17 Pemda dalam masa kepemimpinan Ambar Wahyuni sebagai Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dilanjutkan dengan Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan pada Semester II Tahun 2019; Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2018; Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK; hingga Pemeriksaan Kinerja Dana Desa Tahun 2018 pada lima Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Ketua kunker yang juga merupakan Ketua Komisi XI DPR RI dan rombongan terlihat begitu antusias atas pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan. Atas hal tersebut Ketua kunker sudah merasa cukup puas atas pemaparan tersebut, dan kiranya terkait progres tindak lanjut, kendala-kendala, jalinan hubungan antara BPK dengan Pemda, serta sikap dan upaya BPK agar rekomendasi hasil pemeriksaan dapat efektif dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh Pemda.

mendorong upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. BPK berharap rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dapat memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan serta sebagai bahan evaluasi bagi pemda dan jajaran dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Dengan membaiknya pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah, kesejahteraan seluruh masyarakat akan meningkat, adil dan merata.



Upacara-Upacara yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2019

1. Hari Kesaktian Pancasila

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor. Sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Subauditorat Sumatera Utara II, Puspitaningtyas. Sementara bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Pemeriksa Subauditorat Sumut I, Agung Hasan Sadikin.

Dengan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini selain untuk memperingati jasa para Pahlawan Revolusi diharapkan bisa jadi bagian upaya melestarikan, mengamalkan, dan mengembangkan Pancasila sebagai sumber nilai yang telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Hari Sumpah Pemuda

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara di halaman kantor Perwakilan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Subauditorat Sumatera Utara I, Andanu. Sementara bertindak sebagai Komandan Upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini adalah Ketua Tim Senior Subauditorat Sumut II, Faizal.

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan Tema “Bersatu Kita Maju” ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam sumpah pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

3. Hari Pahlawan

Hari Pahlawan diperingati oleh BPK



Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan melaksanakan upacara bendera sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan atau pejuang pendahulu kita. Sejalan dengan ungkapan salah seorang The Founding Fathers kita yang menyatakan bahwa “hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, dapat menjadi bangsa yang besar”.Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Sekretariat Perwakilan, Sigit Hermawan dan sebagai komanda upacara Pengendali Teknis, Dudi Agung Soemantri.

Tema Peringatan Hari Pahlawan tahun ini adalah “Aku Pahlawan Masa Kini” artinya menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga Negara Indonesia, dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI, seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum.

4. HUT KORPRI

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-48 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di halaman kantor. Bertindak selaku Inspektur

Upacara adalah Kepala Subauditorat Sumatera Utara I, Andanu, dan sebagai Komandan Upacara adalah Kepala Subbagian SDM, Tongku Badullah Harahap. Inspektur membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia, Korpri dimana bertugas untuk melayani bekerja menyatukan bangsa dan mengabdikan kepada negara Republik Indonesia untuk mengelola pemerintahan yang

kuat, cepat, kreatif, dan maju serta menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Dalam menerapkan Panca Prasetya Korpri, ingatlah bahwa pengabdian anggota Korpri bukanlah kepada kepentingan kelompok maupun individu melainkan hanyalah kepada negara, bangsa dan rakyat.

5. Hari Ibu

Menyambut akhir Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Ibu ke-91 Tahun 2019 di halaman gedung kantor. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala Subbag Umum & TI, Suharto, dan sebagai Komandan Upacara Pemeriksa Pertama, Ricky Yosua Fernandes.

Inspektur membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Tema “Perempuan Berdaya Indonesia Maju”. Dalam sambutannya, beliau ingin mengajak semua perempuan untuk terus maju, mampu menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan tentunya akan bersama laki-laki menjadi kekuatan besar yang memastikan terwujudnya SDM unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Maju.